



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém

Conceição Savio, E. da

Citation

Conceição Savio, E. da. (2016, January 28). *Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/37552>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/37552>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/37552> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Conceição Savio, Edegar da

Title: Studi sosiolinguistik bahasa Fataluku di Lautém

Issue Date: 2016-01-28

BAB 6

Kesimpulan dan rekomendasi

6.1 Pengantar

Bab terakhir ini memberikan ikhtisar keseluruhan bab yang telah dibicarakan sebelumnya. Disertasi ini dibagi menjadi enam bab mengenai multilingualisme dalam keberaksaraan orang dewasa di Timor-Leste. Studi riset ini menyoroti berbagai aspek multilingualisme di Timor-Leste, yaitu: kebijakan politik bahasa, lanskap linguistik, kemahiran, penggunaan dan sikap bahasa di dalam kelas keberaksaraan orang dewasa di Lautém. Bahasa Fataluku adalah bahasa terbesar yang terdapat di tiga subdistrik Lautém. Perkembangan bahasa Fataluku juga terlihat dalam berbagai media sosial, misalnya *facebook* dan *sms*. Hal ini menunjukkan liberalisasi bahasa pada era teknologi abad ke-21. Bahasa Tetun sebagai bahasa resmi penting dan digunakan oleh semua orang di Timor-Leste. Bahasa Tetun dan bahasa Portugis menjadi bahasa resmi edukasi, tetapi apa yang terjadi pada saat ini di Lautém menyimpang dari kebijakan politik bahasa nasional. Hal ini tampak dalam pilihan penggunaan bahasa lain daripada bahasa Tetun dan bahasa Portugis oleh guru dan pelajar dalam komunikasi di kelas. Selain itu, bahasa Indonesia masih digunakan dalam edukasi formal di perguruan tinggi dalam pengajaran, khususnya dalam penulisan. Demikian pula, dalam edukasi nonformal di Lautém ialah juga bahasa Fataluku yang digunakan dalam pengajaran di kelas keberaksaraan orang dewasa.

6.2 Kesimpulan

Bab 1 menyimpulkan bahwa Timor-Leste adalah negara baru, yang lahir melalui tiga kejadian historis, yaitu kolonisasi Portugis dari tahun 1511 sampai tahun 1975, diselingi penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945 serta penjajahan Indonesia dari tahun 1975 sampai tahun 1999. Pada tahun 1999, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Timor-Leste diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum. Waktu mayoritas ternyata memilih kemerdekaan dari Republik Indonesia, PBB mendirikan *United Nations Transition Administration for East Timor* (UNTAET, Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang merupakan pemerintah sementara sampai kemerdekaan resmi pada tahun 2002.

Proses keberaksaraan di Timor-Leste hampir tidak berkembang pada zaman Portugis, hanya gereja yang meneliti bahasa lokal pada zaman itu.

Lautém mempunyai tiga suku utama yang masing-masing mempunyai bahasa sendiri: bahasa Fataluku (subdistrik Lospalos, Tutuala dan Moro), bahasa Makasai (Luro) dan bahasa Makalero (Iliomar). Bahasa Fataluku adalah bahasa yang terbesar dan terdiri dari tujuh dialek.

Penduduk Timor-Leste setidaknya menguasai tiga bahasa: bahasa ibu mereka, bahasa Tetun sebagai *lingua franca* serta bahasa Indonesia. Bilingualisme atau multilingualisme di Timor-Leste berhubung dengan latar belakang tiap penutur. Bahasa Fataluku adalah bahasa lisan yang terancam dan menghadapi perubahan menjadi bahasa tulisan.

Bab 2 menggambarkan bahwa Timor-Leste mempunyai dua rumpun bahasa, yakni rumpun Austronesia dan rumpun non-Austronesia. Bahasa Fataluku merupakan bahasa non-Austronesia atau Papua. Bahasa Tetun (rumpun Austronesia) sudah digunakan oleh para misionaris gereja Katolik pada zaman Kolonial Portugis dan Indonesia.

Kebijakan bahasa kolonial Portugis menciptakan sebuah ‘diglosia yang diperluas’ dengan bahasa lokal sebagai versi yang rendah dan bahasa Portugis sebagai versi yang tinggi. Pada zaman pendudukan Indonesia bahasa Portugis sebagai versi yang tinggi diganti dengan bahasa Indonesia. Fakta bahwa gereja Katolik Timor Timur langsung berada di bawah administrasi Vatikan pada tahun 1977 memungkinkan bahasa Tetun sebagai bahasa liturgi. Bahasa Tetun-Prasa, atau bahasa Tetun-Dili, dipilih sebagai model bahasa ofisial, karena tidak terkait dengan kelompok etnis tertentu. Sesuai dengan Konstitusi pasal 13 (ayat 1 dan 2) bahasa Tetun dan bahasa Portugis adalah bahasa resmi sejajar Timor-Leste. Konstitusi menyebutkan bahasa nasional tanpa menentukannya. Konstitusi pasal delapan memutuskan bahwa bahasa Tetun dan bahasa Portugis adalah bahasa pengajaran dalam edukasi, walaupun tidak diimplementasikan pemerintah secara tegas.

Bab 3 mengenai lanskap linguistik multilingual di Lautém dan membahas jumlah dan kombinasi bahasa, bukan hanya dalam jumlah berbagai bahasa yang ditemukan dalam tanda-tanda (bahasa Tetun, Portugis, Fataluku, Makasai, Makalero, Indonesia, Inggris, Spanyol, Prancis, Cina dan bahasa Korea), tetapi juga dalam jumlah dan tipe kombinasi bahasa. Bahasa Fataluku muncul dalam lanskap linguistik di Lautém, walaupun belum dalam bentuk baku sebagai bahasa tertulis. Bahasa Fataluku terdapat dalam 25% dari semua tanda, baik secara monolingual maupun multilingual. Ini merupakan tingkat persentase yang tinggi sekali untuk sebuah bahasa yang belum beraksara dengan benar, karena ortografinya belum disepakati penutur. Kebanyakan tipe tanda adalah nama Fataluku yang hampir cuma digunakan untuk nama *suco*, *aldeia*, perusahaan dan institut. Walaupun merupakan kata Fataluku, ortografi nama ini berdasarkan bahasa Tetun, Portugis dan bahasa Indonesia. Bahasa Fataluku terutama berbentuk grafiti, sebagian kecil lainnya berupa nama rumah adat, tato, catatan kecil, dan sms. Untuk masa depan, ini adalah titik awal kemungkinan penggunaan bahasa Fataluku bukan saja di tingkat *grassroot* tetapi juga dalam konteks yang lebih formal, seperti tingkat edukasi sekolah dasar dan kelas keberaksaraan. Untuk menjadi bahasa tertulis, standarisasi dan kodifikasi kumpulan bahasa itu harus ada. Untuk menjadi bahasa beraksara, bahasa Fataluku harus dikembangkan oleh Negara. Untuk itu, sangat bermanfaat untuk mendirikan Institut Linguistik Fataluku yang berfungsi sebagai cabang Institut Linguistik Nasional.

Bab 4 mengamati kemahiran dan penggunaan berbagai bahasa yang berbeda dalam komunikasi lisan dan tertulis, dengan menyelidiki sikap bahasa umum dan khususnya sikap bahasa Fataluku, dan juga dengan menyelidiki dampak faktor tingkat edukasi, kelompok-umur, lokasi dan jenis kelamin. Hampir semua responden melaporkan bahwa mereka mahir bahasa Fataluku. Mayoritas juga mengerti bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Portugis sangat sedikit atau hampir tidak dimengerti.

Responden yang edukasinya lebih tinggi, rata-rata lebih mahir bahasa Tetun, Portugis dan bahasa Indonesia. Responden lebih tua, urban, laki-laki, dan yang edukasinya lebih tinggi, dilaporkan lebih mahir bahasa Portugis daripada responden muda, rural, perempuan, dan yang edukasinya lebih rendah. Jumlah tahun edukasi ada efek utama yang signifikan pada multilingualisme. Bahasa Fataluku paling sering digunakan dalam komunikasi lisan, diikuti oleh bahasa Tetun, lalu oleh bahasa Indonesia dan akhirnya oleh bahasa Portugis. Bahasa Fataluku paling sering digunakan di rumah, dengan teman-teman dan dalam peristiwa tradisional. Bahasa Tetun terutama digunakan di tempat kerja dan di gereja. Responden yang berpendidikan tinggi dan yang lebih muda lebih multilingual dan kurang menggunakan bahasa Fataluku. Bahasa Tetun dan bahasa Indonesia adalah bahasa utama untuk membaca dan menulis. Yang menarik untuk dicatat ialah bahwa walaupun responden hampir tidak belajar bahasa Tetun, mereka paling sering menggunakan bahasa itu untuk membaca dan menulis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua yang digunakan untuk membaca dan menulis, kecuali di kantor *suco*. Tampaknya bahasa Tetun dengan mudah menempati posisi bahasa resmi di Timor-Leste dan berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa.

Bab 5 mengenai kelas keberaksaraan orang dewasa di dua subdistrik Lautém, yaitu subdistrik Lospalos dan subdistrik Tutuala dan mengkombinasikan hasil dari empat studi kasus penyisipan bahasa. Kesimpulan bab ini adalah bahwa di kelas bahasa Fataluku merupakan bahasa pengantar utama, karena paling dikuasai. Selain itu juga bahasa Tetun, Portugis dan bahasa Indonesia digunakan. Dalam penggunaan bahasa pengantar utama guru menyisipkan (deretan) kata dari tiga bahasa tersebut. Bahasa Tetun paling sering disisip, bahasa Portugis dan bahasa Indonesia di tempat kedua dan ketiga. Dalam penggunaan bahasa Tetun guru menyisipkan bahasa Fataluku, sisipan kata dalam bahasa Portugis dan bahasa Indonesia di tempat kedua dan ketiga. Dalam penggunaan bahasa Portugis, guru menyisipkan bahasa Fataluku, dan sisipan bahasa Tetun di tempat kedua. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, hanya satu orang guru menyisipkan kata Fataluku. Pelajar terutama menggunakan bahasa Fataluku.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa bahasa Fataluku ternyata kuat dalam domain yang diteliti. Dalam tanda-tanda linguistik bahasa Fataluku terutama ada dalam graffiti dan nama rumah, sedangkan dalam domain-domain pribadi dan dalam kelas-kelas keberaksaraan bahasa Fataluku berfungsi sebagai bahasa komunikasi utama. Bahasa Fataluku dapat menjadi bahasa instruksi melalui perkembangannya dari bahasa yang lisan saja ke bahasa tertulis. Oleh karena merupakan ciri identitas komunitasnya, sikap-sikap terhadap bahasa Fataluku sangat positif.

6.3 Rekomendasi

Tiga rekomendasi dapat saya hasilkan dari riset tesis ini, yaitu:

- 1 Riset tentang bahasa-bahasa nasional Timor-Leste agak sedikit. Untuk mempertimbangkan penggunaan bahasa ini dalam edukasi formal dan nonformal, diperlukan lebih banyak riset tentang struktur linguistik bahasa ini, tentang penggunaannya dan tentang kelakuan bahasa penuturnya. Oleh sebab itu riset bahasa Fataluku kini harus diteruskan secara lebih luas dengan merangkum juga bahasa-bahasa lain di Timor-Leste.

- 2 Seharusnya Institut Linguistik Nasional diberi fasilitas untuk memungkinkan penggunaan teks tertulis dalam bahasa Fataluku dan bahasa lain di semua universitas di Timor-Leste yang diakui secara resmi. Ini juga memuat pengembangan ortografi-ortografi khusus untuk tiap bahasa sendiri.
- 3 Dalam pengembangan lanjutan politik-politik bahasa-dalam-edukasi seharusnya komunitas lokal berperan penting. Seharusnya pemerintah melibatkan penutur-penutur asli bahasa Fataluku dan bahasa-bahasa lain dalam pengembangan dan pelaksanaan politik bahasanya.

6.4 English abstract

Chapter 6 provides the conclusions of the entire thesis and the recommendations that result from this thesis.

Section 6.1 contains an introduction that in a condensed manner explains the structure and focus of the thesis. The study discussed several aspects of multilingualism in adult literacy in Timor-Leste, focusing on the linguistic landscape, on proficiency, use and attitudes of languages and on interaction in adult literacy classes in Lautém District. The largest language of Lautém District is Fataluku.

Section 6.2 displays the overall conclusions of the thesis.

Chapter one introduces the Portuguese, Indonesian and post-Indonesian, independent periods in Timor-Leste's history. Timor-Leste's inhabitants are typically multilingual and often master three languages: their mother tongue, Tetum and Indonesian or Portuguese. Fataluku is the language of the largest ethnic group in Lautém District and has seven dialects. It is an endangered oral language that is however on the brink of becoming a written language.

Chapter two informs about the non-Austronesian origin of Fataluku, whereas Tetum is an Austronesian language introduced in Lautém District by Catholic missionaries during the Portuguese and Indonesian periods. Portugal's language policy created an extended diglossia in which Portuguese was the high variant and the local language the low variant. During the Vatican administration of the Roman-Catholic Church in the Indonesian province of *Timor Timur*, Tetum was acknowledged as liturgical language and after the Independence became acknowledged in the Constitution as the nation's official language next to Portuguese.

Chapter three discusses the multilingual visible linguistic landscape of Lautém District. The discussed linguistic signs display eleven different languages. Twenty-five percent of all signs feature Fataluku, whether they are monolingual or multilingual, which is quite a high amount for a language that lacks a definite orthography. Fataluku is mostly found in graffiti, but also surfaces in names of *sucos* and alike. Although these names are Fataluku, they are written with either Tetum, Portuguese or Indonesian spelling. Writing in Fataluku opens the possibility of using Fatalukuku not only at a grassroots level, but also in more formal contexts like primary school and adult literacy education. To become a language of literacy, Fataluku ought to be developed by the State, for which a special Fataluku Linguistics branch of the National Institute of Linguistics might be helpful.

Chapter four focuses on the proficiency, use and attitudes of languages in spoken and written communication in Lautém District, taking into consideration education, age, location and gender. Almost all respondents confirm to speak and understand Fataluku. Whereas the majority also

understands Tetum and Indonesian, Portuguese appears to be little known. In fact, Portuguese seems confined to educated older males in urban locations. The amount of years of education appears to influence multilingualism. Fataluku is the main language used in oral communication in public and private domains, whereas Tetum and Indonesian are the main languages for reading and writing. Interestingly, almost nobody has learnt how to write Tetum. Next to education, age and location have an impact on language proficiency, use and attitudes. Younger respondents and urban ones use Tetum more and Fataluku less. A trend can be seen in the data as well: the traditional differences between urban and rural, and between men and women, are changing. Rural respondents and women are catching up with the urban ones and with men. Tetum appears to easily achieve its official status and function as a language that unifies the ethnolinguistically diverse people.

Chapter five discusses adult literacy classes in two subdistricts in Lautém District. Even though the classes were about Tetum literacy, Fataluku appears to be the main language of communication. In the utterances of the teachers, Tetum was inserted the most, followed by some Portuguese and Indonesian. Their Tetum utterances were mainly inserted with Fataluku. Also the students mainly used Fataluku.

Overall it can be said that, next to Tetum, Fataluku appeared strong in the studied domains. In linguistic signs it mainly occurred in graffiti and house names, whereas in private domains and in literacy classes it functions as the main language of communication. Through its development of a purely oral language into a written language, Fataluku might become qualified as a language of instruction. The attitude towards the Fataluku language is quite positive, because it constitutes an identity feature of its community.

Section 6.3 provides three separate recommendations:

- 1 There is only a limited body of research on the national languages in Timor-Leste. In order to be able to consider the use of these languages both in formal and non-formal education more research is needed on the linguistic structure of these languages, on their uses and on the language attitudes of their users. Therefore the present research of Fataluku needs to be continued more broadly and needs to be expended to other languages in Timor-Leste as well.
- 2 The National Institute of Linguistics should be facilitated to enable the use of written text in Fataluku and other languages at all officially recognized universities in Timor-Leste. This includes the development of specific orthographies for each language independently.
- 3 In the further development of language-in-education policies, the local communities should play an important role. The government should consider involving native speakers of Fataluku and other languages in the development and implementation of its language policies.

